

PEMANFATAAN REMITANSI EKONOMI DAN SOSIAL DI KALANGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN (STUDI KASUS: DESA PENGGALANG DAN WELAHAN WETAN, KECAMATAN ADIPALA, KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH)

Laila Octaviani

Program Studi Ilmu Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana, Universitas Padjadjaran

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2015

Disetujui Juni 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keyword :

Utilization Remittance Economic and Social Female Migrant Workers, Empowerment Program, Migrant Workers and Residents Forum

Abstrak

Penelitian ini pada Pemanfaatan Ekonomi dan Remittance Sosial antara Buruh Migran Pada Village Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, namun memaksimalkan pemanfaatan remitansi ekonomi yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke kampung halaman mereka. Adanya sistem patriarki dan stigma tentang perempuan pekerja migran sebagai perempuan pedesaan, lulusan SD dan mantan Pembantu Rumah Tangga, yang selanjutnya melemahkan posisi mereka dalam struktur keluarga dan masyarakat. Selama ini, proses pekerja migran migrasi internasional perempuan tidak hanya berbicara masalah atas masalah ekonomi migrasi remittance dan dampaknya terhadap pembangunan yang mereka lupa aspek yang lebih substansial, pengiriman uang yaitu sosial. Dalam hal ini, proses migrasi internasional yang mereka terima dalam bentuk pengiriman uang ekonomi dan sosial dapat menjadi sarana tidak hanya untuk memberdayakan diri mereka sendiri dengan meningkatkan posisi sosial dalam keluarga dan masyarakat dan juga dapat memberdayakan lingkungan. Masalahnya adalah bagaimana memposisikan dirinya (buruh migran perempuan) posting kembali ke daerah asal dari keluarga dan masyarakat struktur. Serta bagaimana menggunakan ekonomi remittance dan perempuan sosial diperoleh pekerja migran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke daerah asalnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memposisikan pekerja migran perempuan setelah kembali ke daerah asal struktur keluarga dan masyarakat melalui penggunaan uang kiriman ekonomi dan sosial yang diperoleh, serta untuk menganalisis dan menerapkan teori / konsep antropologi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi studi partisipasi semua informan yang terkait dengan pemanfaatan remitansi di desa ekonomi dan sosial Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman uang dari yang diperoleh para pekerja migran perempuan ekonomi dan sosial Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dimanfaatkan secara optimal sehingga perempuan pekerja migran dan keluarga mereka menjadi lebih diberdayakan lagi, yang dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu 1) buruh migran perempuan negara tujuan; 2) pengalaman yang diperoleh dari negara tujuan; 3) peran Lakpesdam NU Cilacap bersama dengan Yayasan Tifa dan BNP2TKI, The Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Tempat Asal dengan dana JSDF Bank Dunia serta semua pihak terkait baik pemerintah dan non-pemerintah di pusat dan daerah tingkat dengan melibatkan melalui dukungan untuk pengembangan Organisasi Berbasis Komunitas (CBO) sebagai salah satu pilar perlindungan pekerja migran di daerah asal. Dan keterlibatan instansi terkait dalam melindungi buruh migran, khususnya perempuan di Cilacap, perumusan Kabupaten Cilacap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Cilacap dan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465,2 / 138/29 / Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Pengembangan Keluarga Pekerja Indonesia yang bekerja di Cilacap.

Abstract

This study on the Economic and Social Remittance Utilization Among Migrant Workers At Village Penggalang and Welahan Wetan, District Adipala, Regency of Cilacap, yet maximize the utilization of optimal economic remittances in improving the welfare of the family after returning to their hometown. The existence of a patriarchal system and stigma about migrant workers women as rural women, primary school graduates and former Housemaid, which further weaken their position in the family structure and society. During this time, the process of international migration female migrant workers do not just talk the problem over the issue of migration remittance economy and its impact on development that they forget aspects more substantial, namely social remittances. In this case, the process of international migration that they receive in the form of economic and social remittances can be a means not only to empower themselves by raising social position in the family and society and can also empowering environment. The problem is how to position himself (female migrant workers) post back to the area of origin of the family and community structures. As well as how to use the remittance economy and sosialdiperoleh women migrant workers in order to improve the welfare of the family after returning to their home areas. Therefore, this study aims to position the female migrant workers after returning to the area of origin of the structure of families and communities through the use of economic and social remittances obtained, as well as to analyze and apply the theory / concept of anthropology.

The method used in this study is a qualitative ethnographic method with techniques of data collection is done by in-depth interviews, observation and documentation study participation to all informants related to the utilization of remittances in the economic and social Penggalang and Welahan Wetan village, District Adipala, Regency of Cilacap.

Results showed that the remittances of economic and social obtained the female migrant workers Village Penggalang and Welahan Wetan, District Adipala, Regency of Cilacap be used optimally so that women migrant workers and their families become more empowered again, which is influenced by several factors, namely 1) female migrant workers destination country; 2) the experience gained from the country of destination; 3) the role of Lakpesdam NU Cilacap along with Tifa Foundation and BNP2TKI, The Empowerment of Women Migrant Workers and Their Families in the Place of Origin with funding JSDF World Bank as well as all relevant stakeholders both government and non-government at national and local level by involving through support to development of Community-Based

Organization (CBO) as one of the pillars of the protection of migrant workers in the area of origin. And the involvement of relevant agencies in protecting migrant workers, especially women in Cilacap, the formulation of the Regional Regulation Cilacap District No. 7 of 2014 on the Protection of Indonesian Workers Cilacap and Regent Decree Cilacap No. 465.2 / 138/29/Year 2013 regarding the Establishment Group Family Development Workers Indonesia working in Cilacap.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
lailaoctaviani@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional pada saat ini telah mendunia, bahkan menjadi suatu strategi dalam kelangsungan hidup para migran dan keluarganya. Dengan kata lain, aktivitas migrasi ini dilakukan sebagai *survival strategy* (Haris, 2002: 24). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama seseorang menjadi buruh migran. Menurut Pigay (2005: 3) di Asia, jutaan tenaga kerja asing (sesama Asia) mengisi sektor ekonomi wilayah tersebut. Para migran ini, umumnya datang dari negara dengan tingkat upah buruh yang masih rendah, di antaranya dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sjaastad (1962 dalam Bijak, 2006: 11) bahwa seseorang akan berpindah ke daerah lain apabila berkesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan di daerah asal.

Seiring dengan perkembangan migrasi tersebut, secara global tampak bahwa fenomena migrasi perempuan diindikasikan semakin mendominasi perkembangan tersebut. Dua dekade terakhir ini, terjadi pergeseran perilaku dan kecenderungan migrasi, semakin dominannya perempuan dalam proses migrasi internasional (Guest,

2003; Martin, 2003). Kecenderungan ini juga terjadi di Indonesia, bila dicermati proporsi penempatan buruh migran perempuan (selanjutnya disebut BMP) dan laki-laki diberbagai kawasan, maka penempatan BMP masih mendominasi angka penempatan BMI, kecuali untuk kawasan Amerika dan Eropa. Peningkatan migrasi buruh migran perempuan juga berkaitan dengan tingginya permintaan penata laksana rumah tangga dan pengasuh anak di negara tujuan sedangkan buruh migran laki-laki berkaitan dengan respon proses industrialisasi (Asis, 2003).

Proses migrasi internasional para BMP diatas, tidak hanya berdampak positif tetapi negatif pula. Salah satunya mengurangi angka pengangguran di Indonesia, menambah pendapatan rumah tangga buruh migran tersebut, dan menjadi sumber devisa negara. Dari segi negatifnya diantaranya banyaknya kasus kekerasan, penyiksaan, pemerasan dan pelecehan seksual yang dialami ketika berada di luar negeri atau selama di dalam negeri (sebelum keberangkatan), rentannya untuk diperdagangkan (*trafficking*), sampai dengan kepulangan rawan dengan pemerasan. Permasalahan yang dihadapi BMP tersebut, nampaknya tidak menyurutkan langkah para perempuan Indonesia dengan latar

pendidikan yang rendah dan tinggal di pedesaan untuk mengadu nasib ke luar negeri, melainkan dianggap dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan. Bahkan bekerja di luar negeri sampai hari ini masih menjadi cita-cita mereka.

Feminisasi buruh migran tersebut, nampaknya tidak mendapat respon positif dari berbagai pihak. Penelitian tentang migrasi misalnya, masih jarang yang membedakan antara migrasi yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif gender, teori maupun penelitian tersebut berada pada posisi yang netral gender bahkan buta gender (Chant & Radcliffe, 1992); (Lucas, 2005). Kondisi ini semakin terpuruk jika dilihat dari target devisa negara yang dihasilkan melalui pendapatan yang dihasilkan pekerja migran sebagai sumber pendapatan negara terbesar dalam perekonomian Indonesia (ILO Jakarta, 2008). Kontribusi remitansi para BMP bagi ekonomi nasional mencapai 2,4 miliar dolar AS setahun, sehingga dikatakan sebagai sumber pendapatan kedua terbesar di Indonesia setelah sektor migas.

Pada titik inilah, penelitian tentang migrasi perempuan menjadi urgen untuk dilakukan. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi BMP khususnya setelah kembali ke tanah air (*returning migration*) dengan membawa aliran remitansi. Aliran remitansi BPMP ketika kembali ke Indonesia, seharusnya menjadi sumber penghasilan yang diinvestasikan sehingga mampu meningkatkan status mereka di keluarga dan masyarakat (Chant 1998; Deans 2006; Ramos, 2002 dalam Mukbar, 2009). Namun aliran remitansi tersebut biasanya digunakan

sebagai aliran searah saja (Goldring, 2003; Levitt dan Lamba, 2011), artinya hanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan pembangunan di daerah asal tanpa adanya keberlangsungan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bahkan sekembalinya ke daerah asal, mereka tidak mudah mendapatkan pekerjaan lagi karena peluang kerja yang tersedia sangat terbatas dan telah mengalami perubahan nilai-nilai hidup, sehingga berpeluang menambah jumlah pengangguran yang telah ada, ketidak-setaraan sosial, dan menempatkan rumah tangga buruh migran di daerah asal dalam siklus migrasi yang tidak berkesudahan (Cohen, et al, dalam Dewayanti 2010).

Padahal sebenarnya para buruh migran perempuan menyimpan potensi yang besar jika mampu diberdayakan, mengingat selain remitansi ekonomi yang diperolehnya, mereka memperoleh remitansi sosial selama kepergiannya ke luar negeri. Artinya, kita tidak hanya melihat konsep remitansi ekonomi untuk memaknai proses migrasi, tetapi juga melihat bagaimana keberadaan sekelompok di luar daerahnya telah melahirkan jembatan sosial yang sangat signifikan secara ekonomi sering disebut dengan remitansi sosial. Isu remitansi ekonomi dan sosial yang diperoleh BMP dapat dianggap sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke daerah asal. Ketika kembalinya ke daerah asal, kehidupan mereka berada dalam konteks kerentanan yang dapat terjadi melalui perubahan-perubahan yang mendadak (*shock*), kecenderungan sektor privat serta proses pembentuk akses. Hal ini mempengaruhi pilihan seseorang dalam

merespon aset yang dimiliki ke dalam perilaku memberdayakan terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Melalui remitansi ekonomi dapat memberikan sebagai modal finansial untuk keperluan tertentu atau diinvestasikan untuk kegiatan di masa yang akan datang. Sementara remitansi sosial dapat memfasilitasi pemanfaatan remitansi ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui ide atau pengetahuan baru sehingga terjadi perubahan praktik dalam memanfaatkan remitansi ekonomi yang baik. Dalam proses migrasi internasional para BMP memperoleh remitansi ekonomi dan sosial yang dapat menjadi sarana memberdayakan mereka sendiri dengan mengangkat posisi sosial dalam keluarga dan masyarakat serta juga dapat memberdayakan lingkungannya.

Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menjadi lokasi penelitian dengan alasan sebagai berikut: *pertama* Cilacap merupakan salah satu kantong terbesar BMP di Jawa Tengah; *kedua* Adipala merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap sebagai kantong daerah pengirim BMP terbanyak selain Kecamatan Nusawungu dan Binangun; *ketiga* Desa Penggalang dan Welahan Wetan menjadi salah satu desa percontohan dalam program pemberdayaan BMP dan keluarganya di daerah asal. Hongkong dan Taiwan sebagai negara tujuan yang dipilih dengan pertimbangan memiliki karakteristik yang relatif maju, progresif dan remitansi sosial yang dimiliki jauh lebih beragam daripada BMP yang pulang dari Malaysia dan Timur Tengah. Penelitian mengetahui BMP memposisikan diri mereka setelah kembali ke

daerah asal terhadap struktur keluarga dan masyarakat dan Pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial para BMP yang diperoleh guna meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke daerah asal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian etnografi yang menggambarkan budaya migrasi internasional pada masyarakat Cilacap khususnya pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial di kalangan buruh migran perempuan, dan ingin menggali pandangan hidup para BMP setelah kembali sesuai sudut pandang penduduk setempat sehingga akan ditemukan makna tindakan budaya suatu komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan masalah yang ingin dikaji dengan eksplanasi yang tujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjalankan makna dibalik realita.

Penelitian ini dilakukan di Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Informan kunci dalam penelitian ini adalah buruh migran perempuan yang kembali ke daerah asal yang berjumlah 10 orang, bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, dan negara tujuan dari Hongkong-Taiwan. Disamping itu, untuk melengkapi data penelitian diperlukan informan tambahan berasal dari pihak Dinsos-nakertans, Bapermas PP, PA dan KB, pemerintah daerah, kecamatan dan desa, Lakpesdam NU Cilacap, keluarga dan masyarakat sekitar.

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipasi,

dan dokumentasi. Data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipasi dengan subyek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, media massa, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Sejarah Migrasi di Desa Penggalang dan Welahan Wetan

Pada umumnya, migrasi yang dilakukan para perempuan Indonesia bukanlah sebuah proses yang baru-baru ini saja dilakukan, namun proses yang berlangsung dalam kerangka historis dan perjalanan cukup panjang seiring dengan proses globalisasi yang melanda dunia. Pada jaman penjajahan Belanda, jumlah pekerja Indonesia yang bermigrasi ke negara lain masih sangat kecil dan pada umumnya dipekerjakan sebagai kuli kontrak. Mereka direkrut oleh penjajah untuk mendapatkan tenaga murah yang dipekerjakan di perkebunan yang diatur dalam *Werving Ordonatie* 1880, dan mereka dibawa ke negara-negara seperti Malaysia, Suriname, New Coledonia, Thailand, Burma, Sabah, Serawak, Vietnam dan Australia (Hugo, 1980; 1990). Pada jaman penjajahan Jepang tahun 1942-1944, migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri terus berlangsung (kebanyakan dari Jawa) yang dipaksa bekerja sebagai *romusha* di proyek-proyek pembuatan jalan kereta api, pelabuhan udara, lapangan terbang dan konstruksi di Thailand, Burma dan Singapura (Hugo, 1993; Effendi, 1997). Setelah kemerdekaan, pekerja Indonesia

secara spontan banyak pula yang berangkat ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, pada babak baru ini proses migrasi pekerja Indonesia dan wilayah Asia pada umumnya menjadi penting karena 1) Ledakan minyak (*the oil boom*) pada tahun 1970-an di negara-negara Timur Tengah, yaitu gerakan tenaga kerja tidak terampil di Asia (termasuk Indonesia) mulai mengalir ke negara-negara tersebut; 2) Tahun 1980-an dan buruh musiman berangkat ke Asia Timur yang tengah memacu pembangunan ekonomi, akibat perluasan sektor jasa, bertambahnya jumlah penduduk yang rendah dan adanya gejala penduduk lanjut usia (lansia), maka negara-negara ini mengalami kekurangan tenaga kerja khususnya di bidang pekerjaan yang sulit, kotor dan berbahaya.

Peran Lakpesdam NU Cilacap

Lakpesdam NU Cilacap merupakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Cilacap yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia NU, salah satunya adalah memperjuangkan hak-hak para BMP dengan mendorong lahirnya peraturan daerah khusus buruh migran sampai di tingkat desa, yaitu Peraturan Desa. Bekerjasama dengan Yayasan TIFA, *Japan Social Development Fund World Bank*, BNP2TKI membentuk program pemberdayaan BMP dan keluarganya di daerah asal, implikasinya adalah Pembentukan Forum Warga Buruh Migran (FWBM) pada tahun 2011. FWBM ini beranggotakan pemerintah desa, mantan

buruh migran, keluarga buruh migran, dan pihak-pihak yang peduli terhadap isu tersebut.

Ada 30 desa yang menjadi anggota forum warga buruh migran yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala. Lakpesdam NU Cilacap juga mendampingi 19 Forum Warga (FW) berbasis teritorial (desa dan kecamatan) dan 12 forum warga berbasis sektoral (pedagang kecil, petani organik, peternak, pengrajin, pekebun). Saat ini, ada 2 FW berbasis pedagang kecil telah memiliki Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Mal Watamwil (BMT), seperti BMT EL-Sejahtera Cipari.

Pandangan BMP terhadap Struktur Keluarga dan Masyarakat

Pemaknaan tentang perempuan selalu dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat, yaitu mengkontruksikan konsep-konsep sosial budaya tentang sosok laki-laki dan sosok perempuan, seolah-olah menjadi keharusan yang terpenuhi oleh kedua jenis kelamin. Diantaranya pengkategorian tentang sifat perempuan dan laki-laki merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya oleh masyarakat tertentu menyangkut “apa yang pantas” dan “apa yang tidak pantas”. Di Jawa Tengah, sosok perempuan ideal adalah “ibu yang baik” dan “istri yang baik dan patuh” (Berninghausen dan Kerstan, 1992; Abdullah, 1997). Sedangkan dalam masyarakat, sosok perempuan juga sering dipandang sebagai objek domestikasi (perempuan yang tidak ke luar rumah) dan ideologi familialisme direproduksi dalam dunia kerja (perempuan dianggap sebagai hanya pelengkap bukan

pelaku utama), sehingga eksistensi perempuan tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Kondisi semacam ini terus berlangsung dalam berbagai bentuk diskursus yang dilanggengkan dengan berbagai institusi sosial. Akibatnya, ketika ada seorang perempuan dan laki-laki yang tidak memenuhi *stereotip* gender seperti yang diinginkan oleh masyarakat, maka mereka langsung mendapat label menyalahi kodrat, padahal kodrat dan konsep gender sama sekali berbeda.

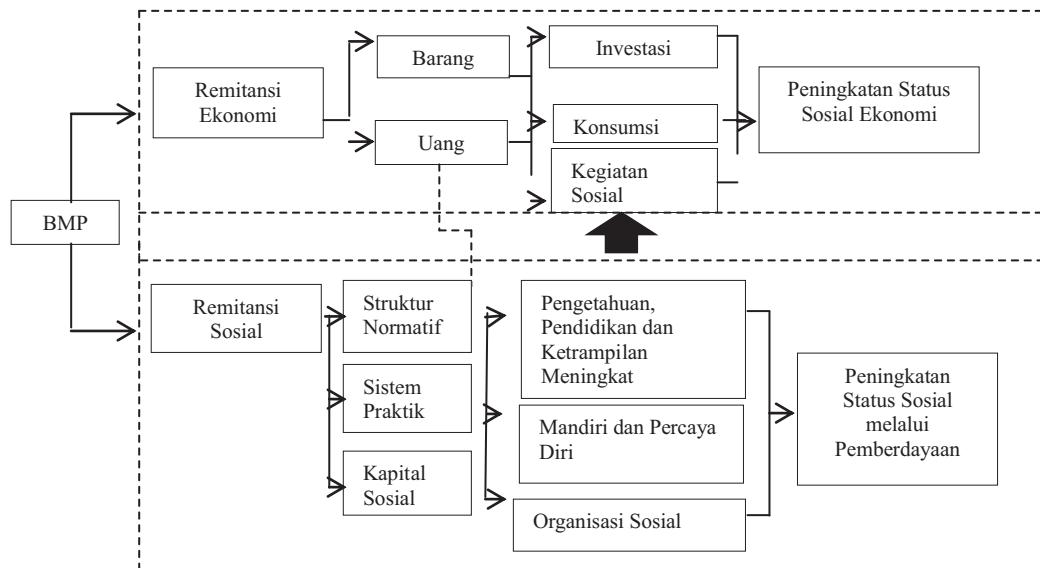
Semakin banyaknya perempuan ke luar rumah, sudah selayaknya juga diikuti berbagai perubahan *stereotip* yang sudah melekat pada masyarakat tentang sosok perempuan. Seharusnya perempuan sudah mulai bergeser perannya, tidak hanya pada sektor domestik tetapi juga mulai merambah pada sektor publik. Pandangan masyarakat sudah harus memulai melakukan redefinisi tentang sosok perempuan. Dimana perempuan tidak hanya terlibat dalam sektor pertanian, tetapi juga bekerja di pabrik di kota, sektor perkebunan bahkan menjadi BMP di luar negeri sebagai penata laksana rumah tangga. Hal ini menunjukkan, bahwa perempuan telah merespon langsung perubahan ekonomi rumah tangga dan perkembangan aspirasi perempuan. Tetapi secara sosial posisi mereka masih tetap belum bergeser dari konstruksi sosial yang ada. Namun dalam berbagai kasus yang ditemui di Adipala, para BMP mulai dihargai dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakatnya. Hal itu juga dipengaruhi, setelah keikutsertaan para BMP dalam FWBM yang difasilitasi Lakpesdam NU Cilacap, bersama Yayasan TIFA dan BNP2TKI, *Japan Social Development Fund*

serta dibentuknya pula Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI di Cilacap yang difasilitasi oleh Bapermas PP, PA, dan KB Cilacap.

Pemanfaatan Remitansi Ekonomi dan Sosial Melalui Program Pemberdayaan

Pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial para BMP di Adipala dipengaruhi oleh: Belajar dari Negara Tujuan BMP yaitu Taiwan dan Hongkong sebagai negara tujuan yang memberikan peluang lebih baik dibandingkan negara tujuan lainnya dalam menumbuhkan remitansi sosial yang diperoleh para BMP. Adanya hak dan kewajiban bagi BMP di Hongkong diatur secara jelas dalam *Employment ordinance chapter 57* tersebut membuat BMP memperoleh hak dan kewajiban sebagai buruh dengan baik, diantaranya hak untuk libur pada hari Minggu dan hari besar lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi bentuk remitansi sosial yang diperoleh para BMP diatas, yaitu berbagai jenis pengetahuan (dapat berbahasa Inggris, Arab, dan Kantonis), dapat mengoperasikan alat-alat rumah tangga modern, pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi, etos kerja disiplin, tepat waktu dan kerja keras, serta perubahan cara pandang (*mind set*) dalam pendidikan anak, kemandirian, pernikahan, relasi gender dalam keluarga dan terbentuknya jaringan sosial karena keterlibatan beberapa BMP dalam organisasi (organisasi advokasi buruh migran, keagamaan). Untuk membedakan antara remitansi ekonomi dan remitansi sosial yang diperoleh para BMP dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Pola pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial di Kabupaten Cilacap, yaitu Penggalang dan Welahan Wetan menunjukkan bahwa beberapa para BMP berhasil menjadi kekuatan bagi mereka untuk memberdayakan dirinya, baik secara individu maupun kelompok melalui program pemberdayaan BMP dan keluarganya melalui Forum Warga Buruh Migran. Di Desa Penggalang dengan FWBM “Hikmah Langgeng” memfokuskan kegiatan produksi kesed bahan perca dan makanan/kue, sedangkan Desa Welahan Wetan “Al-Barokah” mengelola usaha simpan-pinjam dan pembuatan bakso.

Peran Keluarga, Masyarakat dan Stakeholders dalam Memberdayakan BMP

Ada beberapa pihak berperan penting dalam mengembangkan remitansi ekonomi dan sosial yang diperoleh para BMP yaitu Dinsosnakertrans, Bapermas PP, PA, dan KB, keluarga dan masyarakat. Diantaranya: 1) Pemerintah daerah dengan komitmen dan upaya untuk melindungi TKI yang kembali (dikenal dengan TKI purna) telah dirumuskannya Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap. Sedangkan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa memberikan pelayanan terhadap calon TKI (persyaratan dalam dokumen, sosialisasi dalam kegiatan pembinaan dan pemantauan, serta memfasilitasi kegiatan para dinas terkait). 2) Dinsosnakertrans, pihak yang paling bertanggungjawab untuk memberikan dukungan terhadap para BMP yang kembali dengan penyuluhan dan sosialisasi tentang

migrasi yang aman seperti memberikan pelatihan dari BLKLN Kabupaten Cilacap sebagai tempat pendidikan dan *assessments* kompetensi para calon TKI. 3) Bapermas PP, PA, dan KB, pihak yang juga berperan dalam memberdayakan para BMP dan keluarganya melalui Keputusan Bupati No. 465.2/138/29/Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Cilacap. 4) Masyarakat, berperan dalam memberikan ruang bagi para BMP untuk memanfaatkan remitansi ekonomi dan sosial dengan terbukanya pandangan masyarakat awam mengenai TKI. Dan 5) Keluarga adalah pihak pertama yang memberikan dukungan tersebut, dalam memanfaatkan remitansi yang diperolehnya (baik untuk investasi, konsumsi, pendidikan), dan memberikan motivasi dalam hal-hal yang teknis (menjaga anak ketika para BMP melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat bahkan ikut serta dalam aktivitas tersebut sehingga mendapatkan pengalaman, pengetahuan baru mengenai permasalahan yang dialami para BMP)

Kendala dalam Pemanfaatan Remitansi Ekonomi dan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial yang diperoleh BMP diantaranya 1) Stigma dalam masyarakat tentang perempuan pencari nafkah bukan merupakan pantulan dari perubahan ideologi patriarkhi dan memudarnya ketimpangan gender. Para BMP bukan hanya dilihat dari mobilitasnya yang memberikan kenaikan pendapatan, melainkan belum merubah relasi gender dan

bargaining positionnya. 2) Sulitnya mengelola usaha, menurut hasil FGD *Need Assessments* yang telah dilakukan oleh Lakpesdam NU Cilacap, di Gedung KPN Nusawungu tanggal 23 April 2013, menyatakan bahwa sulitnya mengelola usaha di bidang pemasaran dan ijin usaha.

PEMBAHASAN

Teori dalam penelitian ini menggunakan praktik sosial = (*habitus* x modal) + ranah menurut Bourdieu(1993), maka akan dianalisis sejauh mana hubungan antara agen (individu) dan struktur dengan relasi antara *habitus* dan ranah yang melibatkan modal. Dalam hal ini, *habitus* mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan kontribusi tersendiri pada realitas dunia. Karenanya cara perkembangan, *habitus* tidak pernah “tak berubah” baik melalui waktu untuk seorang individu, maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana posisi yang terdapat dalam berbagai ranah berubah-ubah, demikian juga berbagai disposisi untuk membentuk *habitus*. Sumber pertama yang membentuk *habitus* adalah agen-agen yang melakukan sosialisasi, hal ini adalah struktur masyarakat patriarkhi dalam hubungan gender yang selama ini terjadi di dalam keluarga BMP, dimana suami mendominasi sebagai pemegang kekuasaan dalam berbagai aspek.

Fenomena BMP yang terjadi pada awal 1980-an sedikit banyak telah merubah pola hubungan yang patriarkhi selama ini, yakni nilai pemungutan. Walaupun basis ekonomi yang dimiliki BMP tidak secara

otomatis memberikan pengaruh pada BMP dalam pengambilan keputusan tetapi memberikan pengaruh pada pola hubungan gender. Terkait dengan basis ekonomi yang diperolehnya tidak berbanding lurus dengan permasalahan yang dihadapi para BMP, khususnya permasalahan ketika kembali ke daerah asal yang menjadi persoalan pelik, sebab sekembalinya mereka ke daerah asal bukan semakin baik dalam hal posisi mereka, namun semakin terpuruk dalam hal kondisi perekonomian keluarga. Disebabkan keterbatasan pendidikan yang ditempuhnya yang lulusan SD, kurangnya pemahaman tentang tujuan bekerja di luar negeri dalam pemanfaatan remitansi yang diperolehnya sehingga gaya hidup yang berlebih-lebihan dalam menggunakan uang/barang menjadi pola hidup kebanyakan para BMP setelah kembali. Serta kurangnya peran dari pemerintah (baik ditingkat hulu hingga hilir) selaku pihak yang seharusnya melindungi mereka, terkait dengan sumber devisa terbesar untuk negara guna pembangunan daerah.

Oleh karena itu, yang dilihat dari BMP setelah kembali bukan hanya saja aspek ekonominya tetapi juga perlu melihat aspek lainnya, salah satunya bentuk dari remitansi sosial. Dengan kata lain, *habitus* secara erat dihubungkan dengan “modal”, karena sebagian *habitus* tersebut berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal. Dan pada kenyataannya, *habitus* menciptakan sebentuk modal (simbolik) di dalam dan dari diri mereka sendiri. Dalam hal ini, modal yang diperoleh BMP bukan hanya remitansi ekonomi, tetapi ada juga remitansi sosial. Bentuk remitansi sosial yang diperoleh para BMP, yaitu struktur normatif, sistem praktik,

dan kapital sosial, melalui ranah “program pemberdayaan” yang menjadikan mereka lebih berdaya dan mandiri.

Ranah, sebagai ranah kekuatan dan posisi-posisi dinamis merupakan salah satu bentuk modal yang diperjuangkan dan ingin dicapai para agen dengan berbagai strategi yang dilakukannya. Dengan kata lain, peran agen yaitu Lakpesdam NU Cilacap bersama Yayasan TIFA dan BNP2TKI, *Japan Social Development Fund* memfasilitasi para BMP yang kembali ke daerah asal untuk mengkonstruksi dunia sosial mereka dan bertindak untuk mempertahankan atau mempertinggi posisi mereka didalamnya melalui praktik sosial yang dilakukan melalui program pemberdayaan BMP dan keluarganya di daerah asal, dengan pembentukan Forum Warga Buruh Migran (FWBM), dirumuskannya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap dan adanya Keputusan Bupati Nomor 465.2/138/29/Tahun 2013 tentang pembentukan kelompok Bina Keluarga TKI di Kabupaten Cilacap.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

- 1) Remitansi ekonomi dan sosial yang diperoleh para BMP Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga menjadikan mereka lebih berdaya bagi dirinya dan keluarganya, yang dipengaruhi oleh 1) Negara tujuan BMP Hongkong dan Taiwan yang memiliki aturan hukum bagi buruh migran yang jelas sehingga semakin

menegaskan pentingnya remitansi sosial yang diperolehnya; 2) Pengalaman yang diperolehnya dari negara tujuan; 3) Peran Lakpesdam NU Cilacap beserta Yayasan Tifa dan BNP2TKI, dengan pendanaan *Japan Social Development Fund World Bank* dalam program pemberdayaan BMP dan keluarganya di daerah asal, salah satunya di Desa Penggalang dengan FWBM “Hikmah Langgeng” dan Desa Welahan Wetan dengan FWBM “Al-Barokah”.

- 2) Adanya peran Lakpesdam NU Cilacap diatas, mendorong dinas-dinas terkait melindungi TKI khususnya perempuan di Kabupaten Cilacap, melalui perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap, dan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465.2/138/29/Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Cilacap.
- 3) Kendala dalam pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial para BMP di Kabupaten Cilacap, diantaranya stigma masyarakat terhadap para BMP belum merubah relasi gender, *bargaining positionnya*, struktur masyarakat yang patriarkhi, serta kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan remitansi ekonomi yang tidak berkelanjutan untuk kehidupan masa depan.

Saran

- 1) Bagi BMP, tumbuhkan rasa semangat

- dan kesadaran terkait program pemberdayaan yang diberikan hanya agar tidak selalu tergantung terhadap bantuan yang diberikan dari dinas-dinas terkait.
- 2) Bagi BNP2TKI dan Dinsosnakertrans Kabupaten Cilacap, diharapkan memberikan pembekalan pengetahuan saat di negara tujuan bahkan sekembalinya ke tanah air dengan pengetahuan dalam memanfaatkan remitansi yang diperolehnya.
 - 3) Bagi dinas-dinas terkait lainnya perlu adanya koordinasi yang jelas dalam meningkatkan kualitas para BMP baik pada saat pemberangkatan, di negara tujuan dan setelah kembali ke daerah asal agar tidak saling tumpang tindih atas tanggungjawab yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bijak, Jakub. 2006. *Forcecasting International Migration: Selected, Theories, Models, and Methods. Working Paper. Central European Forum for Migration Research (CEFMR) is a Research Partnership of the Foundation for Population, Migration and Environment, Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences and the International Organization for Migration*. Copyright by Central European Forum of Migration Research Warsaw, August 2006 ISSN 1732-0631 ISBN 83-60462-03-8.

Bourdieu Pierre. 1993. *The Field of Cultural Production: Essays on Art*

and Leisure. New York: Columbia University Press.

Chant, S & S. Radcliffe. 1992. Migration and Development: The Importance of Gender. Dalam *Gender and Migration in Developing Countries*. Ed. S. Chant. London and New York: Bellhaven Press.

Dewayanti, Ratih. 2010. Penguasaan Tanah, Migrasi Internasional dan Perubahan Pedesaan. dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol 15 No 2.

Guest, Philip. 2003. *Bridging the Gap: Internal Migration in Asia. Paper Prepared for Conference on Africa Migration in Comparative Perspective*. Johannesburg. SouthAfrica 4-7 June 2003.

Goldring, L. 2003. 'Family and Collective Remittances to Mexico: A Multi-Dimensional Typology'. *Development & Change*, 35(4):799-840.

Haris, Abdul. 2002. Migrasi Internasional dan Pembangunan: Realitas Ekonomi Politik yang Terabaikan. Dalam Abdul Haris dan Nyoman Andika. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia dari Perspektif Makro Ke Realitas Mikro*. Yogyakarta: LESFI.

Hugo, Graeme. 1995. *International Labor Migration and Family: Some Observation from Indonesia, Asian and Pacific Migration Journal* 4 (2-3).

..... 1997. *Undocumented International Migration An Increasing Global Trend*. Adelaide. The University of Adelaide.

- ILO Jakarta. 2008. *Flyer, Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers.*
- Keputusan Bupati Cilacap No 465.2/ 138/ 29/ Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Cilacap.
- Levitt, P. And Deepak Lamba-Nieves. 2011. Social Remittances Revisited. *Journal of Ethnic and Migratation Studies.* Vol 37. No. 01, pp 1-22.
- Lucas, Robert EB. 2005. *International Migration and Economic Development: Lessons from Low-Income Countries.* Almkvist & Wiksell International Stockholm.
- Pigay, Natalis. 2005. *Migrasi Tenaga Kerja Internasional Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap.